

**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2013**

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I
2.	RUU tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II
3.	RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II
4.	RUU tentang Mahkamah Agung	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III
5.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III
6.	RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (judul dalam Prolegnas: Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IV
7.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IV
8.	RUU tentang Jalan	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi V
9.	RUU tentang Perdagangan	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VI
10.	RUU tentang Perindustrian	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
			Komisi VI
11.	RUU tentang Keantariksaan	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VII
12.	RUU tentang Jaminan Produk Halal	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VIII
13.	RUU Tentang Tenaga Kesehatan	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IX
14.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi X
15.	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI
16.	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI
17.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian → RUU tentang Usaha Perasuransian	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI
18.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Baleg
19.	RUU tentang Organisasi Masyarakat	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
20.	RUU tentang Keamanan Nasional	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
21.	RUU tentang Perubahan atas	DPR	RUU dalam tahap

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris		Pembicaraan Tk.I di Pansus
22.	RUU Tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
23.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (<i>Judul dalam Prolegnas : RUU tentang Perlakuan Khusus Daerah Kepulauan</i>).	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
24.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (<i>Judul dalam Prolegnas RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri</i>).	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
25.	RUU tentang Perjanjian Internasional	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
26.	RUU tentang Pemerintahan Daerah	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
27.	RUU tentang Desa	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
28.	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
29.	RUU Tentang Pembiayaan Perumahan Rakyat → Berubah judul menjadi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR	RUU telah ditetapkan menjadi usul DPR
30.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	DPR	RUU telah ditetapkan menjadi usul DPR
31.	RUU Tentang Lambang Palang Merah → RUU tentang Kepalangmerahan	DPR	RUU telah ditetapkan menjadi usul DPR
32.	RUU tentang Keperawatan	DPR	RUU dalam tahap harmonisasi
33.	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji	DPR	RUU dalam tahap harmonisasi
34.	RUU Tentang Pertanahan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi II
35.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IV
36.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V
37.	RUU Tentang Pencarian Dan Pertolongan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V
38.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VI

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
39.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VII
40.	RUU Tentang Kesetaraan Gender	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VIII
41.	RUU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX
42.	RUU Tentang Kesehatan Jiwa	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX
43.	RUU Tentang Kebudayaan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X
44.	RUU Tentang Sistem Perbukuan Nasional	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X
45.	RUU Tentang Kawasan Pariwisata Khusus	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X
46.	RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi XI
47.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Baleg
48.	RUU Tentang Perubahan Atas	DPR	RUU dan NA

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden		disiapkan oleh Baleg
49.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Baleg
50.	RUU Tentang Keinsinyuran	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Baleg
51.	RUU Tentang Advokat	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Baleg
52.	RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Baleg
53.	RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Agama
54.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
55.	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
56.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
57.	RUU tentang Administrasi Pemerintahan	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
58.	RUU tentang Rahasia Negara	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Pertahanan
59.	RUU tentang Pertembakauan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Baleg
60.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi III
61.	RUU tentang Konservasi Tanah dan Air	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IV
62.	RUU tentang Kelautan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh DPD
63.	RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Baleg
64.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan
65.	RUU tentang Perubahan atas UU No 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Energi dan SDM
66.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
67.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri
68.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
			Kementerian Keuangan
69.	RUU tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Standarisasi Nasional
70.	RUU Perubahan atas UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
5.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi